

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara agraris, sektor pertanian memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan nasional. Peranan tersebut antara lain: meningkatkan penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta perlu dipertahankan untuk keseimbangan ekosistem (lingkungan). Peranan tersebut dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pada masa krisis ekonomi yang dialami Indonesia, satu-satunya sektor yang menjadi penyelamat perekonomian Indonesia pada tahun 1997-1998 dan memiliki pertumbuhan yang positif adalah sektor pertanian.

Bintoro (1990), berpendapat pada umumnya pembangunan nasional di negara sedang membangun (NSM) mengutamakan pembangunan ekonomi melalui pertumbuhannya, dan yang paling terasa ketidakmerataan pembangunan ekonomi adalah pembangunan dalam sektor pertanian. Pembangunan sektor pertanian merupakan salah satu kunci dalam perekonomian yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan juga mempunyai peran strategis dalam pembangunan pedesaan. Titik berat pembangunan jangka panjang ekonomi dengan sasaran utama pencapaian keseimbangan antara bidang pertanian dengan industri, untuk itu diperlukan kekuatan dan kemampuan sektor pertanian.

Sektor pertanian memiliki potensi untuk dikembangkan, hal ini dapat dilihat dari distribusi PDB sektor pertanian merupakan sektor ekonomi dengan kontribusi tertinggi kedua terhadap total PDB setelah Industri Pengolahan, yaitu

sebesar 13,45% pada tahun 2016, dengan pertumbuhan sebesar 3,25%. produk domestik bruto menurut lapangan usaha di Indonesia tahun 2013-2016 dapat dilihat pada pada Tabel 1.

Tabel 1. Produk Domestik Bruto menurut Lapangan Usaha di Indonesia Tahun 2013-2016

No	Lapangan Usaha	Distribusi PDB (%)			
		2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,36	13,34	13,49	13,45
2	Pertambangan dan penggalian	11,01	9,83	7,65	7,21
3	Industri Pengolahan	21,03	21,08	20,97	20,51
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,03	1,09	1,14	1,15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,07	0,07
6	Konstruksi	9,49	9,86	10,21	10,38
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,21	13,43	13,31	13,19
8	Transportasi dan Pergudangan	3,93	4,42	5,02	5,22
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,03	3,04	2,96	2,92
10	Informasi dan Komunikasi	3,57	3,50	3,52	3,62
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,88	3,86	4,03	4,20
12	Real Estate	2,77	2,79	2,84	2,81
13	Jasa Perusahaan	1,51	1,57	1,65	1,71
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,90	3,83	3,90	3,86
15	Jasa Pendidikan	3,22	3,23	3,36	3,37
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,01	1,03	1,07	1,07
17	Jasa Lainnya	1,47	1,55	1,65	1,71
	Total	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian hal ini disebabkan oleh kondisi alam yang mendukung, keragaman hayati yang melimpah, serta beriklim tropis. Jika dilihat dari kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia pada Februari 2017 masih mempunyai pola yang

sama dengan keadaan Februari 2016 maupun Agustus 2016, yaitu sektor pertanian menempati urutan kedua setelah sektor jasa (47,21%), sebesar 31,74% penduduk bekerja di sektor pertanian, dan selanjutnya adalah sektor manufaktur sebesar 21,05%. Persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Indonesia 2016-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Indonesia Tahun 2016-2017

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2016		2017
		Februari (%)	Agustus (%)	Februari (%)
1	Pertanian	31,74	31,90	31,86
2	Manufaktur	21,05	21,41	20,49
	- Pertambangan	1,09	1,25	1,10
	- Industri	13,24	12,12	13,31
	- Listrik, Gas dan Air	0,33	0,30	0,33
	- Konstruksi	6,39	6,74	5,75
3	Jasa	47,21	46,69	47,65
	- Perdagangan	23,62	22,54	23,37
	- Transportasi	4,30	4,74	4,57
	- Keuangan	2,89	2,98	2,89
	- Jasa Kemasyarakatan	16,40	16,43	16,82
	Total	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Kondisi jenis pekerjaan utama di Indonesia pada Februari 2017 masih mempunyai pola yang sama dengan keadaan Februari 2016 maupun Agustus 2016, yaitu didominasi oleh tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan dengan persentase sebesar 31,20%. Jenis pekerjaan terbesar kedua dan ketiga adalah tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar sebesar 28,74% dan tenaga usaha penjualan sebesar 17,78%. Persentase penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan utama di Indonesia 2016-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Persentase Penduduk Bekerja menurut Jenis Pekerjaan Utama di Indonesia Tahun 2016-2017

No	Jenis Pekerjaan Utama	2016		2017
		Februari (%)	Agustus (%)	Februari (%)
1	Tenaga Profesional, Teknisi, dan yang Sejenis	6,74	7,02	7,34
2	Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	1,01	1,18	1,17
3	Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis	6,44	6,78	6,02
4	Tenaga Usaha Penjualan	18,84	17,91	17,78
5	Tenaga Usaha Jasa	5,47	5,05	6,05
6	Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	31,09	31,28	31,20
7	Tenaga Produksi, Operasi Alat-alat Angkutan dan Pekerja Kasar	28,70	29,04	28,74
8	Lainnya	1,71	1,73	1,71
	Total	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Melihat arti penting sektor pertanian dalam perekonomian nasional, sektor ini seharusnya dapat lebih diperhatikan pertumbuhannya. Meskipun demikian, pembangunan dalam sektor pertanian tidak semudah yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya berbagai kendala-kendala, yang antara lain berupa modal, kualitas tenaga kerja, teknologi, situasi politik, dll. Pembentukan dan pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor dan sekaligus faktor utama pembangunan ekonomi.

Untuk mengatasi permasalahan sektor pertanian yang masih menghadapi kendala minimnya akses terhadap sumber-sumber modal (pembiayaan), diperlukan adanya suatu model pembiayaan yang mampu memberikan stimulus kepada para pelaku usaha pertanian untuk meningkatkan produksinya. Dengan kondisi mayoritas petani yang hanya memiliki skala usaha kecil, sektor pertanian pada umumnya masih mengandalkan modal sendiri dalam pengembangan usahanya (Hafidhuddin dan Syukur, 2008).

Sehubungan dengan usaha untuk mensukseskan pembangunan pertanian terutama dari segi kendala permodalan, maka salah satu cara yang ditempuh adalah melalui investasi. Hal ini didasarkan atas keyakinan bahwa investasi merupakan cara yang tepat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Investasi sebagai suatu bentuk pembiayaan pembangunan merupakan langkah awal dalam kegiatan berproduksi. Kegiatan produksi tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hakekatnya, investasi juga merupakan langkah awal dari kegiatan pembangunan ekonomi. (Dumairy, 2001)

Investasi atau penanaman modal sangat penting dalam pembangunan nasional, termasuk sektor pertanian, sehingga merupakan salah satu kegiatan strategis untuk memacu pembangunan dan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. (Van der Eng, 2008) mengatakan bahwa dalam perspektif jangka panjang ekonomi makro, investasi akan meningkatkan stok kapital, yang mana penambahan stok kapital akan meningkatkan kapasitas produksi masyarakat, yang kemudian mempercepat pertumbuhan laju ekonomi nasional.

Alternatif yang dapat dikembangkan adalah pembiayaan melalui perbankan syariah. Dengan karakteristik perbankan syariah yang berbasis pada sektor riil, maka pola pembiayaan syariah pertanian diharapkan dapat dikembangkan dengan baik. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia merupakan fenomena yang menarik. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama muslim dapat memberikan pangsa pasar yang sangat potensial bagi perkembangan perbankan syariah. Sistem keuangan di perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tahun 2011-2016 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2016

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah BUS	11	11	11	12	12	13
2	Jumlah UUS	24	24	23	22	22	21
3	Jumlah BPRS	155	158	163	163	162	166
4	Jumlah Jaringan Kantor (BUS + UUS)	1.737	2.262	2.588	2.471	2.301	2.201
5	Total Assets (Rp. Miliar)	145,47	195,02	242,28	272,34	296,26	356,5
6	Pertumbuhan Aset (%)	49	34	24	12,41	9,00	20,28
7	Market Share (%)	3,98	4,58	4,89	4,85	4,88	5,33
8	DPK (Rp. Miliar)	115,41	147,51	183,53	217,86	231,17	279,34
9	Pembiayaan (Rp. Miliar)	102,66	147,51	184,12	199,3	213,00	248,01
10	NPV (%)	2,52	2,22	2,62	4,33	4,34	4,15
11	CAR (%)	16,63	14,13	14,44	16,10	15,02	16,16
12	FDR (%)	88,94	100,00	100,32	91,50	92,14	88,87

Sumber: Roadmap Perbankan Syariah 2015-2019

Total nasabah perbankan syariah per November 2016 sekitar 15 juta jiwa. Sedangkan nasabah perbankan konvensional mencapai 80 juta jiwa. Meskipun nasabah perbankan nasional lebih besar, perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangatlah pesat. Berdasarkan roadmap perbankan syariah 2015-2019, secara kuantitas pencapaian perbankan syariah semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah bank syariah di Indonesia. Dimulai sejak tahun 2011 hanya ada 11 Bank Umum Syariah (BUS), 155 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan jumlah jaringan kantor baru mencapai 1.737 unit, selama enam tahun mengalami peningkatan. Dalam rentang waktu 2011 sampai 2016, Bank Umum Syariah menjadi 13 unit, yaitu pada Kuartal III tahun 2016, terdapat penambahan 1 bank umum syariah yaitu PT Bank Aceh Syariah yang merupakan hasil konversi dari PT Bank Aceh. Sementara itu jumlah jaringan kantor BUS dan UUS di tahun 2016 berjumlah 2201 kantor, terdiri dari 1869 jaringan kantor BUS dan 332 jaringan kantor UUS. Perkembangan perbankan syariah dalam rentang enam tahun tidak hanya mengalami peningkatan dalam kuantitasnya. Unit usaha syariah

tahun 2011 mencapai 24 unit mengalami penurunan jumlah di tahun 2016 menjadi 21 unit.

Perkembangan aset perbankan syariah meningkat secara signifikan dari Rp. 145,47 miliar tahun 2011 menjadi Rp. 356,5 miliar pada Desember 2016. Dilihat dari FDR (*Financing to Deposit Ratio*) yang menyatakan rasio pembiayaan yang disalurkan dengan besarnya dana pihak ketiga (DPK), bank syariah memiliki rata-rata FDR hampir mencapai 100%. Pencapaian ini memiliki tingkat kegagalan bayar atau *Non Performing Financing* (NPF) kurang dari 5%.

Pertumbuhan dan kinerja positif perbankan syariah akan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dalam suatu negara termasuk pada sektor pertanian. Perbankan syariah merupakan salah satu sumber dalam kemajuan sektor riil. Fungsi perbankan syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat seperti dana pihak ketiga. Semakin banyak alokasi dana pihak ketiga yang dialokasikan pada sektor riil atau produktif maka akan semakin bertambah pembangunan fisik modal yang bisa diciptakan dan nantinya akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Rama, 2010). Akibatnya semakin tumbuh perbankan syariah maka akan semakin besar kontribusinya terhadap kinerja dan pertumbuhan sektor pertanian.

Kontribusi pembiayaan untuk sektor pertanian jika dibandingkan dengan total keseluruhan pembiayaan perbankan syariah, yang terdiri atas BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah) baru mencapai angka 4,01% hingga Desember 2016. Presentase ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan untuk sektor konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 39,35%, diikuti oleh pembiayaan untuk sektor perdagangan besar dan eceran yang sebesar 12,06%. Sementara di sisi lain pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun

2016 mencapai angka 20,28%. Persentase pembiayaan perbankan syariah menurut lapangan usaha di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Persentase Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Lapangan Usaha di Indonesia Tahun 2016

No	Penerima Pembiayaan Lapangan Usaha	Pembiayaan 2016 (Rp. Miliar)	Persentase (%)
1	Pertanian (Pertanian, Perburuan, Kehutanan, Perikanan)	9.936	4,01
2	Pertambangan dan Penggalian	6.604	2,66
3	Industri Pengolahan	19.745	7,96
4	Listrik, gas dan air	8.117	3,27
5	Konstruksi	14.435	5,82
6	Perdagangan Besar dan Eceran	30.319	12,23
7	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	3.043	1,23
8	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	10.921	4,40
9	Perantara Keuangan	18.948	7,64
10	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	12.797	5,16
11	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9	0,00
12	Jasa Pendidikan	3.786	1,53
13	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.030	1,22
14	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya	4.617	1,86
15	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	337	0,14
16	Kegiatan yang belum jelas batasannya	760	0,31
17	Rumah Tangga	97.597	39,35
18	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3.005	1,21
	Total Pembiayaan	248.007	100,00

Sumber: Bank Indonesia, 2016

Oleh sebab itu, penentuan persoalan pokok dan persoalan utama perlu peninjauan secara komprehensif dan teliti. Sektor pertanian memberikan sumbangan yang besar dalam peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan petani dalam kegiatan perekonomian dan pengembangan wilayah, namun dalam hal pembiayaan untuk sektor pertanian tergolong masih sangat kecil, hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang

“Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Sektor Pertanian di Indonesia”

1.2. Perumusan Masalah

Teori pembangunan menyebutkan bahwa sektor pertanian merupakan penggerak pembangunan (*engine of growth*) baik dari segi penyediaan bahan baku, bahan pangan, serta sebagai daya beli bagi produk yang dihasilkan oleh sektor lain. Secara alamiah pembangunan harus didukung oleh berkembangnya sektor pertanian yang kuat baik segi penawaran maupun dari segi permintaan. Dengan kuatnya sektor pertanian dipandang dari sisi penawaran maupun di sisi permintaan maka pertanian akan mampu mendukung dan membuat jalinan dengan sektor kegiatan ekonomi lain (Kuncoro, 2000).

Melihat arti penting sektor pertanian dalam perekonomian, diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan pertumbuhan sektor ini. Meskipun demikian pembangunan sektor pertanian ini tidaklah semudah yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya berbagai kendala-kendala, yang antara lain berupa modal, kualitas tenaga kerja, teknologi, situasi politik, dan lainlain. Pembentukan dan pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor dan sekaligus faktor utama pembangunan ekonomi. Oleh karena itu sektor pertanian membutuhkan pembiayaan dari lembaga pembiayaan, salah satunya adalah Bank Syariah.

Pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor pertanian masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan total pembiayaan keseluruhan, oleh sebab itu perlu di teliti bagaimana pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor pertanian. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor pertanian di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh faktor-faktor kategori kinerja perbankan, instrumen moneter, kondisi makroekonomi, dan *rate of return*, terhadap rasio pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian di Indonesia?
3. Bagaimana kontribusi faktor-faktor kategori kinerja perbankan, instrumen moneter, kondisi makroekonomi, dan *rate of return*, terhadap rasio pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis:

1. Perkembangan pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor pertanian di Indonesia.
2. Pengaruh faktor-faktor kategori kinerja perbankan, instrumen moneter, kondisi makroekonomi, dan *rate of return*, terhadap rasio pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian di Indonesia.
3. Kontribusi faktor-faktor kategori kinerja perbankan, instrumen moneter, kondisi makroekonomi, dan *rate of return*, terhadap rasio pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian di Indonesia.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, penelitian ini memberikan gambaran umum yang lebih jelas dengan menjadikannya informasi dalam pengambilan kebijakan yang tepat bagi perkembangan sektor pertanian Indonesia, sehingga mampu memiliki permodalan yang baik.
2. Bagi masyarakat umum, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor pertanian di Indonesia.

3. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi mengenai pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor pertanian di Indonesia.
4. Bagi peneliti, menambah wawasan peneliti dan memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan ilmu yang didapat selama proses perkuliahan.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini terkait dengan pembiayaan perbankan syariah untuk sektor pertanian di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data *time series* dalam periode 72 bulan terakhir yaitu dari Januari 2011 sampai dengan Desember 2016. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor pertanian dengan lebih detail dan akurat.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya untuk pembiayaan pada sektor pertanian saja. Selain itu, ruang lingkup perbankan syariah yang diteliti dibatasi pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), tanpa menyertakan data dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan pembiayaan perbankan syariah diukur dengan variabel rasio pembiayaan pertanian (PP), sedangkan faktor-faktor yang digunakan pada penelitian ini dibatasi pada beberapa variabel. Variabel yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perbankan syariah (Indikator kinerja perbankan syariah) adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* pembiayaan sektor pertanian (FDR), dan pembiayaan bermasalah sektor pertanian (NPF). Variabel yang menggambarkan indikator instrumen moneter adalah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBSBI), Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (BSBIS), dan penempatan dana pada Pasar Uang dengan Prinsip Syariah (PUAS). Variabel yang

menggambarkan kondisi makroekonomi (Indikator Makroekonomi) adalah tingkat inflasi. Variabel yang menggambarkan *rate of return* adalah variabel *equivalent rate* pembiayaan sektor pertanian (ERP), *equivalent rate* dana pihak ketiga (ERDPK), dan suku bunga kredit bank konvensional (SBK).

